

BAB III

ANALISIS STRUKTUR MAKRO: INTERAKTIVITAS @GERINDRA SAAT TERJADINYA KASUS PEMERKOSAAN

Pada bab ini akan dipaparkan temuan dari hasil analisis teks Twitter yang diproduksi oleh akun @Gerindra dan balasan warganet selama kurun waktu 19-26 Mei 2021. Teks-teks yang dijadikan objek analisis adalah cuitan terkait perkembangan kasus pemerkosaan yang menyeret partai politik Gerindra.

Dalam analisis teks Twitter ini terdapat 14 teks yang diproduksi dalam waktu yang berbeda-beda oleh Gerindra. Adapun, @Gerindra melalui kultwit sempat membagikan opini dan sikap terkait posisi partai di kasus pemerkosaan ini. Bagi partai politik Gerindra, hal tersebut bukanlah ranah partai untuk bisa menjatuhkan sanksi secara langsung dan cepat, sehingga pihak partai pun menyerahkan kewenangan sepenuhnya pada pihak penyidik untuk melakukan penyelidikan, yaitu pihak kepolisian.

Selain itu, peneliti juga menemukan banyaknya respon negatif dari warganet atas cuitan yang diproduksi oleh Gerindra soal sikap partai mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi. Banyak *mention*, *reply* dan *quotes retweet* yang masuk ke @Gerindra untuk sekadar bertanya bagaimana perkembangan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang anak kader Gerindra dan apa saja upaya yang dilakukan oleh partai politik Gerindra untuk terus mengawal kasus ini. Oleh karenanya pengujian terkait interaktivitas akun ini sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana komunikasi antara partai dengan publik, utamanya saat Gerindra diterpa *bad news* terkait salah seorang anak kader yang menjadi pelaku dari pemerkosaan anak di bawah umur.

Dengan begitu, agar lebih jelas mendapatkan gambaran umum atau gagasan inti dari suatu teks, maka peneliti akan menggunakan elemen struktur makro. Adapun, menurut Afrizal (2017) struktur makro adalah makna umum atau global dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini bukan akan memberikan gambaran dari seorang pembuat teks dalam melihat atau memandang

suatu peristiwa. Hal yang diamati di sini adalah tema atau topik tentang bagaimana Gerindra memandang kasus pemerkosaan yang menyeret nama seorang kader dari partainya.

Teun A. Van Dijk sendiri mendefinisikan topik sebagai struktur makro dari suatu wacana. Dari topik, kita bisa mengetahui masalah dan tindakan yang diambil oleh komunikator dalam mengatasi suatu masalah. Tindakan, keputusan atau pendapat dapat diamati pada struktur makro dari suatu wacana. Misalnya, apa yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah dan bagaimana cara memutuskan, mengontrol bahkan melawan pihak lawan. Untuk itu, agar dapat memahami apa yang disampaikan melalui sebuah teks, maka analisis dilakukan dengan struktur makro.

3.1 Analisis Struktur Makro Interaktivitas Cuitan @Gerindra dan Warganet

Secara garis besar, kasus ini diawali dari salah satu cuitan warganet @soontoberichest, “@Gerindra, min tolong tindak kadernya kesalahannya fatal banget. Kalau admin baca tapi ga nindak, nanti gerindra di doain ga dapet suara pemilu 2024,” ujarnya pada 19 Mei 2021. Cuitan warganet ini pun punya interaktivitas yang tinggi, di mana *likes*-nya tembus 913. Sementara jumlah *retweets*-nya mencapai 57. Unggahan tersebut pun langsung dibalas dengan cepat oleh Gerindra dengan isi cuitan “Anaknya bukan kader, Kak”



Gambar 3.1 Teks yang diproduksi oleh @Gerindra dan @soontoberichest

Adapun, gambar 3.1 dengan kalimat “*Anaknya bukan Kader, Kak*” dimaksudkan bahwa anaknya tidak menjabat status sebagai seorang kader partai, sehingga otomatis pelaku tidak termasuk bagian dari anggota institusionalis hirarkis partai, sehingga tindakan dari anak kader tersebut bukanlah tanggung jawab Gerindra, meski orangtuanya tergabung menjadi kader dari Gerindra. Lalu, seberapa jauh sebuah partai politik bertanggung jawab? Berdasarkan Jurnal milik Wahyu soal *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana* terkait cakupan konsep pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang disebutkan. *Pertama*, pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, di mana dasar pemikirannya adalah bahwa partai politik itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas suatu pelanggaran, tetapi selalu pengurus partai politik lah yang melakukan delik. Oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. *Kedua*, partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang

bertanggung jawab, yang sesuai dengan teori identifikasi meskipun dalam kenyataan secara fisik partai politik tidak bisa melakukan perbuatan dan partai politik tidak memiliki sikap batin seperti halnya person alamiah, namun dalam melakukan perbuatan hukum partai politik dapat melakukan suatu perbuatan dan memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana melalui organ-organ yang ada di dalamnya yakni pengurus atau anggota dari partai politik tersebut. Perbuatan dari organ partai politik diidentifikasi sebagai perbuatan dari partai politik, namun pertanggungjawabannya berada pada pengurus dari partai politik tersebut. *Ketiga*, partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab, di mana alasan dasarnya dilihat dari perkembangan partai politik itu sendiri, bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu dan ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup, misalnya mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.

Artinya, jawaban "*Anaknya bukan Kader, Kak*" selain punya arti bahwa anaknya tidak menjabat status sebagai seorang kader partai, jawaban ini juga menjadi penyederhanaan dari sebuah konsep pertanggungjawaban partai politik. Di mana, apabila seorang kader yang terdaftar dalam hirarki organisasi diminta pertanggungjawabannya dalam sebuah kasus saja harus memenuhi beberapa kriteria, misalnya dengan sengaja memaksa seseorang atau suatu badan memberikan sumbangan kepada partai politik serta meminta dari atau memberikan kepada pihak lain sumbangan dalam bentuk apapun. Maka, apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana seorang kader masih sebatas pelaku sebagai individu yang tidak berdampak pada partai politik. Ditambah lagi, dalam kasus pemerkosaan ini, sang anak tidak masuk ke institusional partai, sehingga partai pun tidak punya kewenangan apapun untuk menindak atau menjatuhkan sanksi apapun. Cuitan dari Gerindra ini pun menciptakan interaktivitas yang tinggi berupa jumlah likes yang

mencapai 711 dan *quote retweet* sebanyak 1.499, ramainya interaksi membuat cuitan Gerindra menjadi viral.



Gambar 3.2 Teks yang diproduksi oleh @abdhy_sejiwa dan @Gerindra

Selanjutnya untuk mengetahui topik yang sedang diwacanakan, dapat dilihat dari akun Twitter @abdhy_sejiwa yang mencuitkan pertanyaan soal penindakan kader akibat adanya kasus pemerkosaan yang terjadi, *“tanya nih @Gerindra, apakah kadernya masih aktif? Kalau masih, ya balik ke masing-masing aja gimana mau nyikapi partai ini,”* cuitnya pada 19 Mei 2021. Setelah tweet tersebut beredar, Gerindra pun membalas, *“Maksudnya partai harus memberikan sanksi kepada orang tua atas kejahatan yang dilakukan anaknya, gitu?”*

Jelas, untuk cuitan Gerindra kali ini, Gerindra membalas dengan nada sinis dan mempertanyakan kembali maksud dari pertanyaan warganet yang terkesan meminta penonaktifan kader atas suatu kesalahan diperbuat anaknya. Hal ini pun, tidak disetujui

oleh Gerindra, di mana, sikap Gerindra sejak awal memang merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 sampai pasal 5 KUHP terkait *Tanggung Jawab Orang Tua Jika Anak Melakukan Tindak Pidana*, di mana secara tegas, asas hukum pidana mengatur bahwa tanggung jawab pidana itu tak bisa dialihkan kepada orang lain.

Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga atau orang tua si anak dari pelaku tindak pidana. Sehingga, dalam konteks jawaban Gerindra, sebuah kejahatan yang dilakukan oleh sang anak, tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidana berupa sanksi kepada orang tuanya. Prinsip ini memang berdasarkan KUHP Pasal 285.



Gambar 3.3 Teks yang diproduksi oleh @emosyondamej dan @Gerindra

Namun respons ini dinilai oleh warganet sebagai pembelaan Gerindra terhadap kader. Akun @emosyonal damej mencuitkan “mulai deh ngebela kader,” di mana, cuitan tersebut disampaikan setelah @Gerindra meminta para warganet untuk membaca melihat kasus ini dalam perspektif hukum. Cuitan “mulai deh ngebela kader,” menandakan bahwa warganet merasa Gerindra melakukan penyangkalan bahwa kader tidak terlibat dalam kasus pemerkosaan.

Terkait hal ini, maka sikap Gerindra dapat dijelaskan oleh teori dari William Benoit, yang menguraikan konsepsinya dalam bukunya *Accounts, Excuse, An Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies* bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak salah satunya aktor politik apabila tertuduh oleh suatu hal, sebagai cara memahami situasi krisis citra pribadi atau organisasi, maupun sebagai langkah taktis untuk memulihkannya. Pemikiran Benoit berpusat pada aktifitas komunikasi sebagai instrumen utama dan citra terbaik sebagai tujuan akhirnya.

Untuk meyakinkan ketajaman pemikirannya, Benoit mengambil contoh aktual strategi yang dilakukan para politisi dan selebriti ketika mendapat kasus miring, seperti yang dilakukan Hugh Grant ketika dituduh terlibat prostitusi atau Ratu Elizabeth ketika mengelola kasus pasca kematian tragis Lady Diana yang mengguncang kerajaan Inggris. Pada level organisasi, Benoit juga mengambil contoh AT & T, perusahaan telekomunikasi raksasa AS mengelola citra pasca dikabarkan bangkrut tahun 1991. Skandal Presiden AS Bill Clinton dan bentuk klarifikasi yang ditempuhnya ketika dituduh berselingkuh dengan Monica Lewinsky menjadi salah satu obyek kajian Benoit yang akurat terkait restorasi citra.

Bagi Benoit, mempertahankan citra dengan kategori baik adalah tujuan utama komunikasi politik dalam Pemilu. Elemen “wajah” visual Parpol sama penting dengan elemen individu atau organisasi dalam pencitraan ulang. Aspek persepsi merupakan sasaran dasar aktifitas pemulihan citra sehingga sebagai aktor tertuduh, Partai Politik harus memakai proaktif. Aktor baik Parpol ataupun politisi yang melakukan tindakan buruk harus pula memutuskan strategi terbaik berdasarkan situasi politik aktual di lapangan.

Terdapat lima teori yang diperkenalkan Benoit tentang strategi pemulihan citra: Pertama, denial (penolakan adalah reaksi alami terhadap sebuah tuduhan). Maknanya adalah seseorang atau organisasi dapat menyangkal bahwa tindakan itu terjadi atau menyangkal peran mereka dalam melakukan hal itu. Ada dua model denial. Pertama, *simple denial*, penyangkalan sederhana, seperti ucapan kami tidak melakukan hal ini. Kedua, *shifting the blame* atau menyangkal perbuatan dan menggeser kesalahannya kepada orang lain dengan mengatakan: bukan kami, namun orang lain yang melakukannya. Kedua, *evading responsibility* (menghindari tanggungjawab). Ketika seseorang tidak dapat menyangkal melakukan perbuatan, organisasi mungkin mencoba untuk menghindar dari perbuatannya sendiri. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai lepas tanggung jawab atau menghindari tanggung jawab terhadap tindakannya tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tanggung jawab terhadap tindakan yang dimaksud.

Pada strategi ini, Benoit mengelompokkannya menjadi beberapa varian: (1) *Scapegoating* (pengkambinghitaman): aktor dapat mengklaim bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap tindakan salah yang lain. (2) *Defeasibility*: aktor memohon kurangnya pengetahuan atau kontrol tentang faktor-faktor penting yang berhubungan dengan tindakan. (3) *Ofensif*, pihak tertuduh melakukan kesalahan karena kekurangan informasi dan kompetensi. Dalam strategi menghindar tanggungjawab, aktor bisa membuat an excuse based on accidents (alasan berdasarkan kecelakaan), membuat alasan atas faktor-faktor di luar kendali organisasi. Aktor tidak dapat menyangkal tidak melakukan suatu kekeliruan, tetapi mengakui bahwa tindakan itu terjadi secara tidak sengaja (tidak diduga) yang disebabkan oleh keadaan yang juga tidak diduga sebelumnya. Aktor berupaya mengklarifikasi bahwa melakukan suatu kekeliruan tidak bermaksud sebagai sebuah kesalahan yang disengaja. Ketiga, *reducing offensiveness* (mengurangi pertahanan). Seseorang atau organisasi berusaha untuk mengurangi tingkat persepsi negatif di benak publik. Strategi ini memiliki beberapa komponen, yaitu bolstering, mengurangi dampak negatif dengan cara menunjukkan ide positif. Seseorang atau organisasi mengingatkan publik atas perilaku baik yang pernah

ia lakukan sebelumnya atau reputasi yang sebelumnya baik, mencoba meraih simpati publik dengan mengutip tindakan positif di masa lalu, tanpa mengkaitkan dengan kesalahan yang telah diperbuat hari ini.

Komponen selanjutnya adalah *minimization* atau mengurangi opini buruk. Mencoba untuk meminimalisasi perasaan negatif terhadap hal yang terjadi dengan cara memberikan persuasi yang baik. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa hal yang terjadi tak seburuk seperti yang dipikirkan. Aktor juga bisa mengembangkan metode *differentiation* (perbandingan), perbuatan itu dibedakan dari tindakan lebih ofensif lain untuk mengurangi perasaan negatif membandingkan dua perilaku kontradiktif. Komponen lain yang kerap kali dipakai politisi dalam kerangka bertahan adalah aspek *attacking accuser* (menyerang penuduh). Aktor menyerang individu penuduh dengan cara mempertanyakan kredibilitas sumber tuduhan. Pada strategi ini aktor berharap kredibilitas penuduh rusak sehingga tuduhan akan dipertanyakan. Pada saat aktor gencar menyerang penuduhnya, perhatian publik diharapkan teralihkan. Komponen terakhir adalah pemberian kompensasi (*compensation*). Aktor menawarkan mengganti kerugian atau memperbaiki obyek yang rusak akibat perbuatan korupsinya. Kompensasi identik dengan penawaran dalam upaya menebus kesalahan, dengan tujuan agar tuduhan atau liputan media berakhir dan perbuatan individu atau organisasi diampuni serta reputasinya kembali.

Keempat, *corrective action* (tindakan korektif). Janji bahwa aktor akan memperbaiki masalah untuk mengembalikan situasi ke kondisi sebelumnya atau menjanjikan untuk membuat perubahan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Tindakan korektif adalah strategi pengembalian citra dimana pihak tertuduh berusaha untuk mengembalikan citranya dengan menjanjikan bahwa tindakan tersebut akan diperbaiki. Coombs (2006) menilai pilihan politik terhadap strategi tindakan korektif harus dibarengi ruang akses publik selaku korban untuk melakukan pengawasan yang ketat. Kelima, *mortification* (sikap bertanggungjawab dan mohon maaf). Organisasi atau seseorang secara berani dan terbuka mengakui, bertanggungjawab atas perbuatannya serta meminta maaf. Benoit menyebut ini strategi penyiksaan diri. Aktor

memilih untuk mengakui kesalahan dan meminta pengampunan kepada publik. Meskipun dalam teori pemulihan citra mengintroduksi strategi penggunaan penyiksaan diri dan tindakan korektif, maka organisasi atau individu disarankan memilih strategi lain terlebih dahulu. Dalam kultur politik yang rasionalistik, pilihan strategi mortification and corrective action sangat beresiko kerusakan citra permanen, karena membentuk sikap final publik yang memvonis aktor bersalah dan untuk itu tidak layak dipercaya di masa depan (Benoit, 1995).

Sehingga, berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam hal ini tindakan Gerindra termasuk ke dalam *evading responsibility* (menghindari tanggungjawab). Ketika seseorang tidak dapat menyangkal melakukan perbuatan, organisasi mungkin mencoba untuk menghindar dari perbuatannya sendiri. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai lepas tanggung jawab atau menghindari tanggung jawab terhadap tindakannya tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tanggung jawab terhadap tindakan yang dimaksud. Dalam strategi menghindar tanggungjawab, aktor melakukan *defeasibility*, yakni aktor membuat alasan atas faktor-faktor di luar kendali organisasi dan kurangnya pengetahuan atau kontrol tentang faktor-faktor penting yang berhubungan dengan tindakan. Gerindra seakan menunjukkan ketidaktahuannya dan kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Gerindra karena sang anak bukanlah kader Gerindra.

Tindakan *shifting the blame* atau menyangkal perbuatan dan menggeser kesalahannya kepada orang lain dengan mengatakan: bukan kami, namun orang lain yang melakukannya juga dilakukan oleh Gerindra, terbukti dengan cuitan “*anaknya bukan kader*” dan “*Maksudnya partai harus memberikan sanksi kepada orang tua atas kejahatan yang dilakukan anaknya, gitu?*” tentu ini memberikan kesan bahwa Gerindra mencoba untuk menerpa *bad news* yang menyeret Gerindra pada kasus pemerkosaan dan meminta kasus ini tidak disangkutpautkan kepada partai.

Selanjutnya, Gerindra pun kembali membalas dengan nada menantang dan meminta pasal rujukan soal tanggung jawab orang tua kepada warganet. “*Biar enggak*

dibilang membela, coba tolong bantu Admin carikan pasal rujukan yang menyatakan bahwa orang tua dijatuhkan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan anaknya,”

Balasan cuitan Gerindra pun semakin diperkuat dengan adanya fakta bahwa usia sang pelaku adalah 21 tahun yang artinya peradilan akan dilaksanakan sesuai dengan sistem peradilan untuk orang dewasa di lingkungan peradilan umum. Di mana, orang tua dan partai Gerindra tidak berhak untuk terseret atas tindakan yang dilakukan oleh sang anak kader.

Lalu, Gerindra pun menyatakan bahwa setiap kultwit yang disampaikan partai politik itu didasarkan perspektif hukum dan peraturan yang berlaku, yang artinya Gerindra akan selalu taat pada proses hukum yang memerlukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu, hingga akhirnya mengarah pada proses penyidikan. Hal ini dilakukan Gerindra, agar tidak sembarangan dan gegabah dalam menghakimi suatu pihak. Tak hanya itu, Gerindra juga menekankan kepada para warganet di beberapa cuitannya untuk secara cermat membaca *tab & tweets* agar bisa mendapatkan informasi secara utuh. Sebab, apabila hanya dengan mengartikan satu *tweet* tanpa membaca konteks, hal ini tentu dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga mudah terprovokasi. Padahal, terkait kasus pemerkosaan ini, partai politik Gerindra turut memberi dukungan penuh dalam menindak tegas anak kader Partai Gerindra tersebut. Sebab negara menjamin warga negara Indonesia untuk bisa terlindungi.

Cuitan yang dikeluarkan oleh Gerindra mengenai kasus pemerkosaan, memang acapkali menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat atau publik yang pro adalah mereka yang dapat menerima dan setuju, bahkan mendukung kebijakan sebagaimana yang diinginkan pihak komunikator politik



Gambar 3.4 Teks yang diproduksi oleh @Noonecri dan @Gerindra

Dalam situasi ini Gerindra bermaksud *reducing offensiveness* (mengurangi pertahanan). Seseorang atau organisasi berusaha untuk mengurangi tingkat persepsi negatif di benak publik dengan cara minimization atau mengurangi opini buruk. Mencoba untuk meminimalisasi perasaan negatif terhadap hal yang terjadi dengan cara memberikan persuasi yang baik. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa hal yang terjadi tak seburuk seperti yang dipikirkan. Contohnya, seperti Gerindra yang memberikan apresiasi kepada warganet, karena memahami apa yang dimaksud oleh Gerindra. “Terima kasih sudah membaca tab tweets & reply nya, ya,”

Berdasarkan penelitian Strategi Penanganan Krisis Partai Dari Pandangan Publik milik Budianto (2014) baginya partai politik memiliki cara-cara yang berbeda dalam merespons pemberitaan buruk terkait kasus korupsi. Secara keseluruhan terdapat tiga kategori bagaimana partai politik memberikan reaksi dan strategi yaitu: (1) Proaktif, yakni dengan mengambil langkah yang tepat ketika krisis terjadi. Nasdem dan Hanura merupakan dua partai yang masuk kategori didalamnya. (2) Adaptif, yakni cenderung melihat situasi ketika terjadi krisis. Partai Golkar dan PDI Perjuangan

masuk dalam kategori ini. (3) Reaktif, yakni mengambil langkah yang tidak tepat ketika terjadi krisis. Adapun, partai yang melakukan hal ini adalah Partai Demokrat dan PKS.

Berbeda dengan partai Golkar, PDIP, Nasdem, dan Hanura yang mampu melakukan konsolidasi organisasi secara cepat. Di mana, manajemen partai yang kokoh dan solid memastikan penanganan masalah mendapatkan perhatian khusus sehingga tidak memunculkan gejala yang berkepanjangan.

Partai PKS dan Demokrat justru melakukan blunder dengan statement beragam yang dikeluarkan oleh *elite*. Hal tersebut memicu polemik internal yang berkepanjangan serta berdampak pada informasi yang masuk ke publik bahwa terjadi gesekan kepentingan internal partai. Sementara pada awal kasus yang menimpa elite PKS mencoba membangun opini publik dengan mengatakan bahwa apa yang menimpa mereka adalah sebuah skenario konspirasi zionis dan konspirasi musuh-musuh dakwah. Mereka menggunakan *defense strategy* dengan menempatkan diri sebagai korban dan pihak yang terdhalimi. Seiring dengan perjalanan kasus sikap politik elite PKS terhadap kasus tersebut berubah-ubah. Setelah melakukan *defense strategy* dengan menempatkan diri sebagai pihak yang dizhalimi, mereka berubah sikap dengan mendukung kinerja KPK dan mendorong kasus untuk segera diselesaikan. Dan sikap yang terakhir presiden PKS Anis Matta menyeru kepada seluruh kader untuk minta maaf kepada masyarakat sebagai sebuah upaya menarik simpati publik.

Hasil penelitian kemudian menunjukkan adanya matriks yang menggambarkan faktor-faktor yang membuat partai politik kehilangan kepercayaan publik: Korupsi masih menjadi faktor paling dominan yang mampu meruntuhkan kepercayaan publik kepada partai politik.

Maka, dengan melihat penjabaran di atas, maka Gerindra dalam menghadapi krisis terlihat melakukan *counter* dengan *discourse* yang menyatakan bahwa Gerindra melakukan dengan cara reaktif, di mana manajemen pengelolaan krisis yang sangat bergantung kepada mekanisme partai. Pada awal kasus yang menyeret Gerindra, partai ini mencoba membangun opini publik dengan mengatakan bahwa apa yang menimpa

mereka adalah bukan tanggung jawab dari partai, karena sang pelaku bukanlah kader Gerindra. Mereka menggunakan *defense strategy* dengan menempatkan diri bahwa kasus pemerkosaan bukanlah ranah partai.

Dari sini, melihat respon dari warganet yang sangat emosional, terlihat bahwa perjalanan kasus pemerkosaan, memang sikap partai politik Gerindra cenderung menunjukkan *defense strategy* yang menempatkan diri sebagai pihak yang merasa dirugikan, karena harus ikut terseret dalam kasus pemerkosaan, di mana bukan kader Gerindra lah yang melakukan kesalahan atau menjadi pelaku pemerkosaan.



Gambar 3.5 Teks yang diproduksi oleh @PolJokesID dan @Gerindra

Sebaliknya, gambar 3.5 menggambarkan pada mereka yang kontra akan menunjukkan sikap ketidaksetujuannya, salah satunya dengan cara sindiran. Seperti yang dilakukan oleh @PolJokesID yang menyisipkan *screenshot* atas pemberitaan pemerkosaan dan jawaban yang diberikan oleh Gerindra soal kader yang tidak berhak mendapatkan sanksi. Seakan mengomparasikan, akun @PolJokesID pun memberikan keterangan “*gakkk sih dari pada sanksi, lebih cocok dijadiin duta antikekerasan seksual dan duta HAM,*” ujarnya. Adapun, konteks dari penggunaan duta di Indonesia sendiri adalah seseorang yang mempromosikan suatu bidang yang memercakannya. Namun, untuk saat ini, pemberian gelar duta kerap semaunya dan tidak tepat sasaran, bahkan istilah ini sering diartikan sebagai ungkapan ejekan atas perilaku yang berlawanan. @PolJokesID pun melakukan hal serupa, di mana meski akun tersebut mengatakan “*jadiin duta antikekerasan seksual dan duta HAM,*” ini bermaksud bahwa Gerindra dianggap telah melakukan kesalahan dan pelanggaran terkait kasus pemerkosaan dan HAM.



Gambar 3.6 Teks yang diproduksi oleh warganet

Menurut Keraf (2007) sindiran merupakan suatu bentuk acuan yang mempunyai tujuan tertentu dan mengandung makna yang tersirat atau maksud yang berlawanan daripada perkara yang diujarkan seseorang dengan cara mempertanyakan alasan tindakan tersebut diambil. Seperti, cuitan dari warganet @moeklas_ash “*Ga lucu, mending bagi-bagi sepatu aja lagi sana,*” ungkapannya. Ini merupakan sindiran dari warganet terhadap *branding* yang selama ini dibangun oleh akun Twitter @Gerindra, sebagai partai milenial yang aktif melemparkan guyonan dan tak jarang memberikan *giveaway* kepada para *followers*-nya yang beruntung. Setelahnya Gerindra membalas dengan nada bantahan, “*Emang enggak ngelucu, masa kasus kaya begini dibuat lucu-lucuan,*” tegasnya.



Gambar 3.7 Teks yang diproduksi oleh @Gerindra

Banyaknya sindiran dan bantahan, pasti hanya akan menimbulkan perdebatan tak berujung, di mana dalam setiap debat di Twitter atau di media sosial mana pun yang jarang sekali berujung baik. Sebab, masing-masing akan teguh pada pemahamannya sendiri. Maka, jurus “*Siap, Bang Jago*” menjadi pilihan yang digunakan untuk menanggapi kritik. Bahkan, kalimat ini Gerindra gunakan sebagai kalimat akhir untuk mengakhiri sebuah perdebatan.



Gambar 3.8 Teks yang diproduksi oleh @akunusam @sattoraji @fajarhidayat381 dan @Gerindra

Meski topik perbincangan telah ditutup pada 19 Mei 2021. Namun, akun @Gerindra tetap mendapat pertanyaan lanjutan di hari selanjutnya, yaitu 20 Mei 2021. Adapun, sikap yang dinyatakan oleh Gerindra adalah, apabila kader terbukti bersalah maka partai akan menjatuhkan sanksi melalui Mahkamah Partai.

Berdasarkan Firdaus dan Nalom Kurniawan, “*Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 3 dalam Jurnal *Penguatan Mahkamah Partai Politik Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis dan Penegakan Etika Wakil Rakyat*, M. Maulana Bungaran, Mahkamah Partai Politik sendiri merupakan salah satu alat kelengkapan partai yang wajib ada dan wajib dibentuk setiap Partai Politik menurut ketentuan UU Parpol. Penggunaan istilah “Mahkamah” menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan melalui mekanisme dan prosedur peradilan internal partai.

Dalam konteks ini, akun @Gerindra menyatakan secara tegas apabila kader terlibat dalam tindak pidana ini, maka akan dikenakan oleh Mahkamah Partai, sebab apabila seorang wakil rakyat melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun etika, maka publik akan tertuju kepada Partai Politik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nama baik partai, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, Mahkamah Partai Politik dianggap sebagai ujung tombak penegakan etik di internal, sehingga Partai Politik harus memiliki kemampuan dalam hal ini untuk dapat menggali fakta hukum dalam permasalahan etik tersebut dan menentukan sanksi yang tepat atas permasalahan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 3.9 Teks yang diproduksi oleh @Gerindra

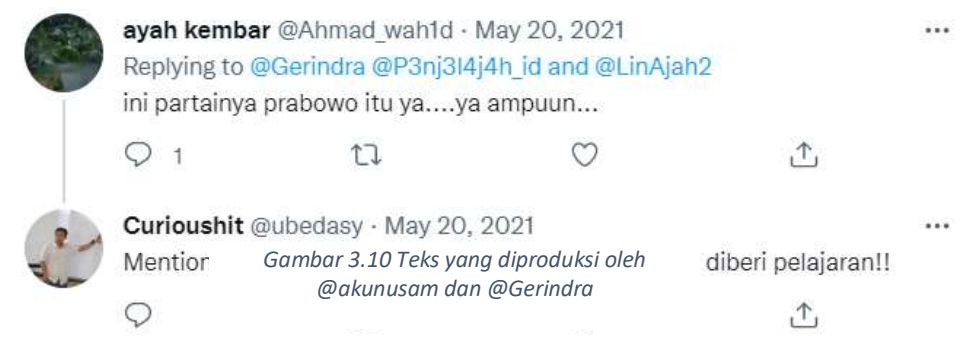
Lalu, di gambar 3.9 ini termasuk ke dalam *tweet* terakhir Gerindra yang menggunakan ungkapan “*bukan ranah partai*” seakan menjadi bukti bahwa @Gerindra tidak akan terlibat lebih jauh lagi atas kasus pemerkosaan tersebut. Di mana, beberapa alasannya sudah disebutkan di atas. Artinya, ada beberapa topik yang dikedepankan dalam kultwit yang diproduksi oleh Gerindra soal kasus pemerkosaan.

Pertama, pelaku bukanlah bagian dari partai Gerindra, *kedua*, meski salah satu kader Gerindra adalah orang tua pelaku. Namun, sesuai dengan aturan, disebutkan bahwa tindak pidana tidak bisa dilimpahkan oleh orang lain, sehingga apabila sang anak dinyatakan bersalah, maka secara hukum, tidak ada sangkut pautnya terhadap orang tua, *ketiga*, usia pelaku 21 tahun, sehingga pelaku sudah bisa dijatuhi sistem peradilan orang dewasa, *keempat*, Gerindra menyatakan bahwa partainya akan selalu menegakkan keadilan. Apabila sang kader bersalah, maka akan dijatuhi sanksi lewat Mahkamah Partai.

Bagi partai politik @Gerindra, ini bukanlah ranah partai untuk bisa menjatuhkan sanksi secara langsung dan cepat. Partai Gerindra juga menyebutkan, demi keamanan dan kenyamanan pihak keluarga korban, jika keluarga merasa diintimidasi, ada baiknya pihak keluarga juga melaporkan hal ini kepada kepolisian. Apabila nanti dibuktikan oleh kepolisian bahwa pihak keluarga/orang tua tersangka terlibat dalam intimidasi tersebut, maka partai baru bisa menindaklanjuti hal ini dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada orang tuanya. Tapi, selama tidak dinyatakan bersalah atau terlibat, partai tidak bisa menindak orang tua tersangka.

Respons partai ini di media sosial justru tampak memicu kemarahan lainnya. Melalui *reply*, diketahui ribuan warganet menuliskan kritik hingga membuat posisi Gerindra dalam posisi tersudut. Hal tersebut dilakukan, sebab bagi warganet, jawaban dari @Gerindra tidak mengandung keberpihakan terhadap korban. Adanya keributan hingga menciptakan interaktivitas yang tinggi antara Gerindra dengan warganet di Twitter, menjadikan kasus ini viral hingga menjadi topik di media sosial hingga dimuat di beberapa pemberitaan media *online*. Hal ini dibuktikan dengan ratusan bahkan ribuan balasan cuitan dari warganet kepada @Gerindra.

Adanya ketidakpuasan atas sikap yang diberikan oleh @Gerindra dengan tidak memberikan dukungan sosial terhadap korban atas kasus pemerkosaan yang terjadi, membuat warganet memperluas jangkauan guna mendapatkan hasil perkembangan lanjutan soal tindakan tegas yang harus dilakukan Gerindra.



Gambar 3.11 Teks yang diproduksi oleh @Ahmad_wah1d dan @ubedasy

Melalui fitur *mention*, warganet berusaha membagikan informasi ke akun Twitter Prabowo Subianto yang dikenal sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Adapula Dahnil Andar yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang kini bergabung bersama Gerindra serta @RahayuSaraswati, yang merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra serta aktivits dalam kasus perempuan dan anak. Ketiga tokoh ini di-mention oleh warganet, sebab dianggap punya posisi strategis dan pengaruh besar dalam menindak Kader dan melakukan evaluasi atas sikap yang dihadirkan oleh akun Twitter @Gerindra.

Budianto (2014) strategi satu pintu atau dengan jubir terbatas membatasi adanya polemik internal karena perbedaan statement antar elite. Media dan masyarakat juga mendapatkan informasi yang jelas dan tegas tentang bagaimana sikap partai terhadap masalah yang tengah dihadapi, dibanding harus seperti Gerindra yang menggunakan admin, sehingga ketokohnya tidak terlihat. Bagi publik aktor ketokohan dan wibawa pemimpin partai dinilai mampu mengatasi persoalan tersebut. Kemudian manajemen partai dalam mengawasi kinerja kader duduk di parlemen dan jabatan publik mampu menekan mereka agar lebih kontributif.

Manajemen partai Gerindra dalam mengelola kader yang duduk di parlemen dan jabatan publik kini mendapat sorotan tajam masyarakat. Bagi warganet, dengan melakukan *mention*, maka itu bisa diartikan bahwa efektifitas *counter issu* yang terletak pada konsistensi *statement* elite partai dalam menyikapi kasus, dan tidak semua elite partai mengeluarkan statement melainkan hanya elite tertentu yang ditunjuk oleh partai untuk menjadi juru bicara di depan media.



Gambar 3.12 Teks yang diproduksi oleh @susirawatilie dan @Amir_Faesal70

Tak hanya itu, kasus pun bergerak ke arah dana yang digunakan oleh sang pelaku, di mana akun @susirawatilie kembali melakukan konfirmasi terhadap @Gerindra. Cuitan dengan kalimat *“kagak salah tuh jari ngetiknya?”* bermaksud sebaiknya Gerindra memikirkan lagi cuitan yang ada dan membacanya secara cermat. Sebab, apabila melihat struktur berpikir yang sesuai, seorang anak dapat kabur dengan leluasa karena adanya kelonggaran dalam pengawasan. Namun, kali ini bukan Gerindra yang membalas, tapi balasan interaksi didapatkan oleh warganet lain yakni @Amir_Faesal70 yang secara spontan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan *“Mungkin kepolisian bisa minta bantu @PPTAK buat telusuri aliran dana bapaknya, mungkin ada yang mengalir ke anaknya selama pelarian,”* ujarnya.



Gambar 3.13 Teks yang diproduksi oleh @fxnkimsj, @mashicu dan @nadseeel

Beberapa akun warganet lain pun di-mention oleh sebagian orang. Tujuannya untuk menciptakan interaksi baru dan bisa ikut berpartisipasi dan memantau pengusutan kasus pemerkosaan yang masih berjalan. Sehingga tak mengherankan, apabila dari banyaknya interaksi yang dilakukan melalui fitur *likes*, *mention* atau bahkan *retweet*, membuat cuitan @Gerindra menjadi viral. Contohnya dari @fxnkimsj yang melakukan mention terhadap @mashicu, “udah gila jawabannya den @mashicu, habis ini auto dipecat si admin” Balasan ini pun direspons oleh @mashicu “wah sinting sih....beneran deh gerindra gak bakal dapet suara lagi kalau gini hmz hmz hmzz” katanya.

Cuitan lain pun didapatkan dari akun @nadseeel “waw jawaban miminnya oke, sabi ini dibikin artikel @GipsyDanger07,” di mana cuitan tersebut dibalas dalam bentuk *likes*. Istilah “*admin*” sendiri merupakan manajer panggung penulis kreatif dari teater politik yang hidup (Saffer, 2013). Krisis citra dapat terjadi kapan saja pada perusahaan, lembaga pemerintah, tokoh, organisasi dan partai politik. Umumnya

terjadi pada waktu yang tidak diharapkan/tidak bisa diprediksi, dalam situasi beragam dan dengan bentuk yang juga bermacam-macam.



Gambar 3.14 Teks yang diproduksi oleh @bugiloljare

Pemilik akun @bugiloljare, melalui tweet-nya pun menjelaskan kekecewaannya. *"Pas denger podcast-nya aku ngerasa kek 'wahhhhhh mbak iki keren puolllllll asik iki'"* bermakna bahwa akun @bugiloljare sudah mengasosiasikan bahwa Rahayu Saraswati punya komitmen kuat dalam merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan lewat perannya di ranah perpolitikan Indonesia. Apalagi, mengingat bahwa saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Sehingga penting untuk peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.

Namun, kalimat lanjutan dari @bugiloljare berupa *"terus pas tau responnya partai begitu tentang permasalahan baru yang rame itu, aku jadi bingung???????????? Mbok yo diaturrrrrrrr kadere"* bermaksud bahwa Rahayu Saraswati kini meski punya pemahaman yang bagus dan komitmen yang kuat dalam menggalakkan kasus perempuan seperti kekerasan, tapi ia pun punya pekerjaan rumah yang besar dalam memberikan pemahaman pada internal partainya soal kasus kekerasan seksual, sebab sebagai cerminan wajah partai di media sosial, jawaban

@Gerindra terhadap pertanyaan yang ditujukan padanya seakan belum memperlihatkan sensitivitas dan dukungannya pada korban.

Pada sejumlah teks ini sangat jelas adanya pemahaman beberapa konteks yang melatarbelakangi diproduksi teks. Adapun, topik wacana yang Gerindra sebarakan, yakni *pertama*, pelaku bukanlah bagian dari partai Gerindra, *kedua*, meski salah satu kader Gerindra adalah orang tua pelaku. Namun, sesuai dengan aturan, disebutkan bahwa tindak pidana tidak bisa dilimpahkan oleh orang lain, sehingga apabila sang anak dinyatakan bersalah, maka secara hukum, tidak ada sangkut pautnya terhadap orang tua, *ketiga*, usia pelaku 21 tahun, sehingga pelaku sudah bisa dijatuhi sistem peradilan orang dewasa, *keempat*, Gerindra menyatakan bahwa partainya akan selalu menegakkan keadilan. Apabila sang kader bersalah, maka akan dijatuhi sanksi lewat Mahkamah Partai. Sejauh ini, selama kader Gerindra tidak terindikasi, maka partai tersebut menggunakan *defense strategy* dengan menempatkan diri bahwa kasus pemerkosaan bukanlah ranah partai.

Sedangkan, jika menyoroti interaktivitas yang terjadi di warganet, bisa terlihat bahwa masing-masing teks memiliki latar belakang konteks yang berbeda, di mana topik wacana dari interaktivitas warganet memfokuskan soal balasan Gerindra yang kurang menunjukkan empati dan menyoroti soal peran partai dan indikasi penyalahgunaan wewenang kader. Itu artinya, segala wacana yang diproduksi oleh beberapa pihak membuktikan bahwa tiap-tiap pihak memiliki agenda masing-masing sesuai dengan situasi yang dirasakan.